



RENCANA KINERJA TAHUNAN

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2015**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Jambi melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana kinerja tahunan yang baik tentu akan memuat indikator kinerja yang menjadi target pencapaian selama tahun anggaran tersebut. Sehingga rencana kinerja tahunan yang telah disusun dapat digunakan untuk menganalisis capaian kinerja sasaran dan kinerja keuangan selama tahun anggaran. Selain itu, terhadap permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan rencana kinerja tahunan akan dapat dicarikan solusi yang tepat agar tidak terulang di tahun tahun yang akan datang. Rencana kinerja mempunyai nilai strategis dalam perencanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, dalam desain rencana kinerja tahunan diperlukan objektivitas terhadap kemampuan dan daya dukung daerah. Disamping itu, diperlukan pula partisipasi aktif dan keseriusan dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dari program pembangunan daerah agar rencana kinerja pemerintah Provinsi Jambi dapat tercapai dengan baik.

1.2. Tujuan Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menetapkan strategi pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah;
- b. Menetapkan rencana kinerja tahunan daerah beserta indikatornya;
- c. Menetapkan rencana kebutuhan dana untuk pencapaian sasaran.

1.3. Manfaat Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016;
- b. Menjadi bahan masukan dalam peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun anggaran 2016.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010 -2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan Visi Pembangunan untuk tahun 2010 – 2015 dengan Visi Pembangunan yang ditetapkan dalam Perda tersebut yaitu : **"EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA"** **JAMBI EMAS 2015**, telah berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur pada tanggal 3 Agustus 2015. Sementara Provinsi Jambi belum menyusun RPJMD yang baru dikarenakan penyesuaian dengan jadwal Pemilukada serentak.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan, maka acuan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2016 adalah RPJPD Provinsi Jambi tahun 2005 – 2025 dan RPJMN tahun 2015 – 2019. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Provinsi Jambi pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan daerah yang tercantum dalam UU N0. 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 serta Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 adalah : ***JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA.***

- MAJU** mengartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- MANDIRI** berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri
- ADIL** mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- SEJAHTERA** mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata

2.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dengan memperhatikan misi dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan misi RPJMN 2015 - 2019 ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016, sebagai berikut:

- 1)** Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik;
- 2)** Mewujudkan peningkatan SDM yang berdaya saing dan berbudaya, yaitu pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan, sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera;
- 3)** Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi, yaitu mengembangkan perekonomian daerah dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis agribisnis dan agroindustri sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- 4)** Pembangunan yang berkeadilan, mandiri dan berkelanjutan, yaitu melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumberdaya Alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;

- 5) Peningkatan good goverment dan democratic government, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk laki-laki dan perempuan agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.

2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2016 adalah :

1. Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik;
2. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia yang berbudaya;
3. Meningkatkan struktur ekonomi yang kokoh dan bernilai tambah dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat dapat sinergis, serasi dan seimbang;

5. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan serta mewujudkan perluasan partisipasi public dalam pembangunan daerah
6. Meningkatkan stabilitas daerah
7. Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat

2.3.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Provinsi Jambi menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk :

1. Terbangunnya konektivitas PKN, PKW dan PKL dalam kerangka jalan primer,
2. Terbangunnya simpul – simpul maritim Provinsi Jambi
3. Terbangunnya infrastruktur penunjang railway (stasiun – pusat – simpul, toll way)
4. Pengembangan sistem prasarana sumberdaya air
5. Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar
6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur Ujung Jabung
7. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata
8. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata
9. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
10. Terwujudnya peran pemuda dalam pembangunan yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga
11. Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
12. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas

13. Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai – nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan
14. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
15. Terlaksananya partisipasi dan kesadaran yang tinggi di semua lapisan masyarakat akan pentingnya kelestarian dan perlindungan kawasan dan cagar budaya, serta tumbuh dan berkembangnya kantong-kantong kebudayaan yang berbasis masyarakat di seluruh Provinsi Jambi
16. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah serta perluasan perwuudan provinsi berbasis teknologi informasi pada setiap kabupaten/kota
17. Meningkatnya kontribusi sektor sekunder dalam PDRB
18. Pembangunan bidang industri dan perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif
19. Pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumberdaya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri
20. Pengembangan teknologi pertanian hulu sampai hilir dalam rangka meningkatkan mutu produk-produk pertanian Jambi
21. Pengembangan perikanan Jambi diarahkan pada penumbuhan perikanan komersia di Pantai Timur, potensi perairan Sungai Batanghari, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan usaha pengolahan hasil, penguatan pasar untuk industri hilir

22. Peningkatan percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan strategis sehingga dapat mengembangkan daerah-daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas administrasi namun lebih menekankan keterkaitan mata rantai proses agroindustri
23. Menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata dan terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam.
24. peningkatan peran aktif dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal, penerapan system informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal, serta semakin lengkap dan memadainya sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan.
25. penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah, dan menjaga kesinambungan fiskal daerah.
26. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
27. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur
28. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan
29. Meningkatnya stabilitas ketertiban, ketenteraman dan kesadaran politik dan hukum masyarakat
30. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat

31. peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi serta memperluas kerjasama investasi antar wilayah/daerah.
32. Peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah
33. Optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan belanja daerah

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016**

Visi : JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik	Terbangunnya konektivitas PKN, PKW dan PKL dalam kerangka Jalan Primer
			Terbangunnya Simpul-simpul Maritim Provinsi Jambi
			Terbangunnya infrastruktur penunjang Rail way (satasiun – pusat simpul, toll way)
			Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air
			Meningkatnya Rasio Elektrifikasi
			Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar
			Meningkatnya pembangunan infrastruktur Ujung Jabung
2	Mewujudkan peningkatan SDM yang berdaya saing dan berbudaya	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang berbudaya.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;
			Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata
			Meningkatnya kualitas Tenaga kerja

			Mewujudkan peran pemuda dalam pembangunan yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing; terlaksananya partisipasi dan kesadaran yang tinggi di semua lapisan masyarakat akan pentingnya kelestarian dan perlindungan kawasan dan cagar budaya, serta tumbuh dan berkembangnya 'kantong-kantong' kebudayaan yang berbasis masyarakat di seluruh wilayah Propinsi Jambi. peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta perluasan perwujudan provinsi berbasis teknologi informasi pada setiap Kabupaten/Kota
3	Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi	Meningkatkan Struktur Ekonomi yang kokoh dan bernilai tambah dengan berbasis pada	Meningkatnya kontribusi sektor skunder dalam PDRB

	daerah.	ilmu pengetahuan dan teknologi	Pembangunan bidang industri dan perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, Pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri. Pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir dalam rangka meningkatkan mutu produk-produk pertanian Jambi pengembangan perikanan Jambi diarahkan pada penumbuhan perikanan komersial di Pantai Timur, potensi perairan Sungai Batanghari, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha pengolahan hasil, penguatan pasar untuk industri hilir,
4	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, Mandiri dan berkelanjutan.	Pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat dapat sinergis, serasi dan seimbang	Peningkatan percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan strategis sehingga dapat mengembangkan daerah-daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas administrasi namun lebih menekankan keterkaitan mata rantai proses agroindustri menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan

			kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata dan terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam. peningkatan peran aktif dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal, penerapan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal, serta semakin lengkap dan memadainya sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan. penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah, dan menjaga kesinambungan fiskal daerah.
5	Mewujudkan peningkatan Good Government dan Demographic Government.	Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan serta mewujudkan perluasan partisipasi public dalam pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur Meningkatnya peran serta Masyarakat dan pemangku Kepentingan dalam proses pembangunan
		Meningkatkan stabilitas daerah	Meningkatnya stabilitas Ketertiban , ketentraman dan kesadaran politik dan hukum masyarakat
		Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

			semua lapisan masyarakat
			peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi serta memperluas kerjasama investasi antar wilayah/daerah.
			peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah.
			optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah.

BAB III

PERMASALAHAN, KONDISI EKONOMI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1. Infrastruktur Daerah

1. Aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentra Produksi, wisata dan industri Belum optimal. Disamping itu masih banyak daerah yang belum mempunyai akses jalan kepada pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan.
2. Belum terpenuhinya standar tonase dan lebar serta kualitas jalan Provinsi.
3. Masih Terbatasnya Outlet Pemasaran produk-produk Jambi terutama pelabuhan laut yang mengakibatkan rendahnya daya saing produk Jambi dan membatasi ekspor Jambi yang membuat Provinsi Jambi kehilangan nilai tambah (Value Added) produknya.
4. Belum optimalnya pemanfaatan Transportasi sungai, danau dan laut. Transportasi ini relatif lebih murah karena mampu mengakomodasi kapasitas angkut yang lebih besar dan biaya perawatan sarana transportasi yang lebih rendah. Revitaliasi transportasi sungai dan laut perlu dilakukan untuk mengembalikan kejayaan transportasi sungai dan laut di Provinsi Jambi.
5. Belum tersedia bandar udara internasional, yang ada hanya satu bandar udara sekunder dan satu bandara udara perintis.
6. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi

khususnya sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi.

7. Belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi rumah, masih terbatasnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan. Jumlah pertumbuhan kebutuhan beban listrik mencapai 13% per tahun, dan pertumbuhan beban puncak mencapai 5 sampai dengan 5,5%. Dengan pertumbuhan beban hingga 13 persen per tahun diperkirakan kebutuhan listrik makin meningkat setiap tahun sebesar 20 – 40 MW per tahun. Sedangkan kapasitas terpasang energi listrik di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2014 sebesar 587.655.845 VA. Kebutuhan listrik ini belum termasuk rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung hingga tahun 2019 yang membutuhkan 150 MegaWatt daya listrik. Selanjutnya untuk pengolahan produk kelapa sawit dan Karet memerlukan daya sebesar 60 Megawatt.
8. Dalam Pengendalian Daya Rusak Air, masih banyak permasalahan yang dihadapi seperti tingginya frekuensi banjir tahunan, berkurangnya daerah resapan air, tingginya aktivitas penambangan pasir dan penambangan emas tanpa izin di hulu (bungo, tebo, merangin dan sarolangun)
9. Masih rendahnya penyediaan sarana air bersih dan sarana sanitasi permukiman di daerah perkotaan- perdesaan, daerah terisolir, dan daerah perbatasan.
10. Masih rendahnya kemampuan pemerintah bagi penyediaan rumah sehat bagi masyarakat. Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2013 sebesar 3.260.511 Jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,86% di tahun 2013, dimana jumlah rumah tangga sebanyak 828.993 Kepala Keluarga yang diperkirakan membutuhkan 84.393 unit rumah baru.
11. Belum optimalnya penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang dan Pengembangan wilayah.

3.1.2. Demografi

1. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Provinsi Jambi. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan. Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan dll yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya.
2. Persebaran penduduk Provinsi antar Kabupaten/kota tidak merata. Terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat Kota Jambi dan sekitarnya. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan.
3. Dalam hal pemanfaatan *the window of opportunity* yang dimulai pada tahun 2022, pemerintah agar bertindak dari sekarang dengan cara penyediaan kesempatan kerja produktif, iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kualitas modal manusia termasuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Sehingga periode bonus demografi yang di mulai tahun 2022 menjadi masa keemasan Provinsi Jambi dengan ditandai dengan tingginya kesejahteraan rakyat.

3.1.3. Pendidikan

Hal-hal yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan adalah :

- 1) Mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang kini semakin mahal, semakin tidak bisa dijangkau oleh rakyat kecil. Padahal justru dari sektor pendidikan lah, banyak orang bisa meningkatkan kualitas dirinya sehingga bisa lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan.
- 2) Banyak orang yang beralih untuk mengambil SMK atau STM, alasannya agar lebih mudah mencari kerja. Kini sektor pendidikan yang dianggarkan 20% diharapkan bisa mengatasi masalah ini, tetapi pemerataannya yang menjadi kendala baru.
- 3) Faktor Pendukung Pengajaran. Rendahnya Fasilitas Fisik. Melihat kondisi di lapangan, banyak sekali lokasi sekolah yang kurang memadai fasilitasnya, mulai dari gedung yang ambruk, lingkungan yang tidak mendukung, sampai bocornya ruang kelas. Tentu hal ini akan mengganggu konsentrasi belajar para siswa sehingga akan mengurangi efektivitas pengajaran.
- 4) Rendahnya Kualitas Tenaga Pengajar. Pendidikan yang bermutu tentu dipengaruhi juga oleh tenaga pendidiknya, semakin baik pendidik maka akan semakin baik pengajaran. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3).
- 5) Rendahnya Kesejahteraan Tenaga Pendidik. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan

terbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta, guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam.

- 6) Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

3.1.4. Kesehatan

- 1) Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpecah dan perbatasan. Aksesibilitas terhadap sarana pelayanan kesehatan cukup baik (jumlah, rasio, dan waktu tempuh), namun masih terjadi disparitas yang cukup besar menurut luas wilayah.
- 2) Kualitas Puskesmas belum optimal, misalnya ditandai dengan puskesmas yang 14 persen rusak berat (tahun 2007), tenaga kesehatan kurang mencukupi, serta tingginya dokter yang tidak hadir dalam jam kerja Biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas yang belum memadai
- 3) Ketersediaan tempat tidur rumah sakit (rasio per penduduk) belum mencukupi. Begitu juga Ketersediaan tenaga dokter spesialis masih kurang terutama untuk rumah sakit di daerah pemekaran, tertinggal, terpencil dan perbatasan.

- 4) **Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.** Berbagai penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, terutama TB, Malaria, HIV, DBD, dan Diare. Beberapa penyakit zoonotik meningkat. Hal ini terkait dengan kerjasama otoritas kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan yang masih lemah. Disamping itu Penyakit tidak menular (jantung, diabetes, hipertensi, kanker) meningkat dan menjadi penyebab utama kematian. Berkaitan dengan pola hidup tidak sehat dan pengendalian faktor resiko masih lemah.
- 5) **Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.** Pembiayaan kesehatan meningkat, tetapi masih rendah dan peran pemerintah dalam pembiayaan masih rendah. Untuk Cakupan asuransi kesehatan belum maksimal karena kepesertaan yang kecil (non jamkesmas). Tantangan ke depan adalah bagaimana mengembangkan asuransi kesehatan nasional (Jamkesmas sebagai cikal bakal), harmonisasi pelayanan, dan penyempurnaan kerangka regulasi.
- 6) **Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan belum merata, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.** Kekurangan jumlah untuk semua jenis tenaga kesehatan (termasuk pada fasilitas kesehatan milik pemerintah). Distribusi tenaga kesehatan yang timpang, terutama di perdesaan dan daerah dengan cakupan geografis yang luas. Begitu pula dengan Kompetensi tenaga kesehatan yang bervariasi terkait dengan sarana dan fasilitas pendidikan. Saat ini pengembangan tenaga kesehatan belum sistematis, dari segi perencanaan produksi, distribusi, dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasannya

- 7) **Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.** Ketersediaan obat program dan vaksin secara umum cukup, tetapi sering terjadi keterputusan ketersediaan karena adanya kesenjangan waktu antara pengadaan dan pemanfaatan terkait dengan sistem manajemen keuangan (proses pengadaan dan DIPA). Disamping itu mutu dan keamanan. Beradanya obat palsu atau tidak terdaftar (sekitar 10 persen), sehingga membahayakan konsumen. Evaluasi *pre - market* dan sarana produksi yang tidak memenuhi syarat masih sangat tinggi. Sebagian besar (85 persen) bahan baku obat masih di impor sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Sedangkan untuk pengembangan potensi obat tradisional dari tanaman obat asli Indonesia sangat terbatas. Dalam menghadapi pasar bebas maka ada pengawasan dan regulasi yang kuat, serta perlunya harmonisasi standard obat.
- 8) **Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal dan lemahnya kerjasama lintas sektor serta dukungan peraturan perundangan.** Pada beberapa kasus (misalnya ASI eksklusif, merokok) pengetahuan masyarakat cukup baik, tapi tidak dipraktekkan. Oleh karena itu perlu dukungan *enabling factors* (mis sarana) dan *reinforcing factor* (peraturan, panutan). Promosi masih terfokus pada pendidikan kesehatan
- 9) **Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian dan pengembangan (litbang) kesehatan.** Masih adanya kesenjangan kebijakan kesehatan (*policy gap*) antara pusat dan daerah. Kebijakan

kesehatan belum dibangun atas dasar *evidence based* dan belum bersinergi dan konsisten antara berbagai jenjang kebijakan (intra dan antar sektor)

3.1.5. KETENAGAKERJAAN

- 1) Banyaknya pekerja yang bekerja di sektor yang kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan yang menyebabkan pekerja rawan terjatuh di bawah garis kemiskinan (*near poor*). Pekerja yang bekerja pada sektor yang kurang produktif dapat dilihat melalui banyaknya jumlah pekerja setengah penganggur yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Pada tahun 2004 jumlah tenaga kerja setengah penganggur adalah 584.5047 orang, meningkat menjadi 596.275 orang pada tahun 2009. Pekerjaan dengan produktivitas rendah secara umum terdapat di sektor pertanian di daerah perdesaan.
- 2) Perbedaan upah yang semakin lebar antara pekerja formal dan informal. Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, upah pekerja informal mengikuti pola upah pekerja formal. Bila upah pekerja formal meningkat maka upah pekerja informal ikut meningkat pula. Para pekerja yang bekerja di industri besar upahnya cenderung meningkat. Sedangkan upah pekerja informal cenderung tidak meningkat. Peningkatan upah pekerja di industri besar tanpa mempertimbangkan produktivitas akan diikuti oleh tingkat pengangguran yang tinggi serta tekanan bagi upah pekerja informal.
- 3) Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Tingkat pendidikan angkatan kerja yang rendah berdampak pada tingkat produktivitas dan ketersediaan lapangan kerja. Data menunjukkan sebagian besar angkatan kerja berpendidikan SLTA kebawah, sehingga lapangan kerja yang dapat menampung

angkatan kerja tersebut sebagian besar unskill, sehingga tingkat upah dan remunerasi juga relatif lebih rendah.

- 4) Pendidikan berdampak positif bagi pembangunan. Semakin tinggi pendidikan penduduk, kontribusi dalam kegiatan perekonomian juga semakin tinggi ditunjukkan oleh besaran TPAK yang meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan. Pada tahun 2013, TPAK penduduk berpendidikan rendah sebesar 61,89 persen meningkat menjadi 67,06 persen untuk penduduk berpendidikan menengah dan 89,34 persen untuk penduduk berpendidikan tinggi. Namun partisipasi yang tinggi ini tidak selalu diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Lapangan kerja yang tersedia cenderung lebih responsive bagi penduduk berpendidikan rendah. Sebagai akibatnya TPT justru rendah pada penduduk berpendidikan rendah, yaitu sekitar 1,82 persen. Sementara TPT penduduk berpendidikan menengah mencapai 6,80 persen dan 4,23 persen untuk penduduk berpendidikan tinggi.
- 5) Identifikasi terhadap kelompok pengangguran terbuka menunjukkan bahwa pada periode tahun 2007 s/d 2012, pengangguran terbuka di perkotaan rata-rata berkurang 3,22 persen per tahun. Sementara di perdesaan pengurangan jumlah penganggur mencapai 9,48 persen per tahun. Pada agustus 2012 terdapat 47.296 jiwa pengangguran terbuka, mayoritas dari mereka (58,83 persen) berada di daerah perdesaan.
- 6) Seiring dengan jumlah pengangguran terbuka yang terus menurun, trend jumlah pengangguran terdidik menunjukkan hal yang menarik. Pada periode 2007-2012, secara rata-rata pengangguran berpendidikan menengah menurun 3,40 persen per tahun dan sedangkan pengangguran berpendidikan tinggi bertolak belakang, malah mengalami peningkatan sekitar 0,56 persen per tahun.

3.1.6. Kemiskinan

1. Keterbatasan Infrastruktur dasar, diantaranya masih rendahnya akses infrastuktur jalan menuju sentra produksi, pemasaran, pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan listrik.
2. Masih tingginya angka kemiskinan; terbatasnya aksesibilitas pangan pada tingkat keluarga terutama pada keluarga miskin; masih tingginya penyakit infeksi; belum memadainya pola asuh ibu; dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar
3. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan dalam rumah tangga terutama pada ibu hamil dan anak balita akan berakibat pada kekurangan gizi yang berdampak pada lahirnya generasi muda yang tidak berkualitas. Apabila masalah ini tidak diatasi maka dalam jangka menengah dan panjang akan terjadi kehilangan generasi (*generation lost*) yang dapat mengganggu kelangsungan berbagai kepentingan bangsa dan negara.
4. Masalah gizi kurang dan buruk dipengaruhi langsung oleh faktor konsumsi makanan dan penyakit infeksi. Secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan dan konsumsi pangan beragam, faktor sosial-ekonomi, budaya dan politik. Gizi kurang dan gizi buruk yang terus terjadi dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan daerah.
5. Beberapa permasalahan pada Program SAMISAKE, yaitu:
 1. Sasaran SAMISAKE baru mengintervensi RTSM, kedepan tentunya perlu diperluas pada Rumah Tangga Miskin (RTM), Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM) bahkan bila memungkinkan Rumah Tangga Rentan Miskin (RTRM).
 2. Pelaksanaan SAMISAKE belum masuk ke klaster 2 (pemberdayaan Masyarakat), masih berada pada klaster 1, 3 dan 4. Pola pendampingan Sarjana Penggerak Pembangunan pedesaan menjadi salah satu cikal bakal menuju klaster 2.

Kedepan SAMISAKE akan masuk pada pola pemberdayaan masyarakat. Apalagi mulai tahun 2015 akan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa.

3. Ketepatan data Rumah Tangga Sasaran masih perlu diperbaiki, baik dari aspek akurasi maupun dari aspek kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dengan kata lain, perlu dilakukan pemutahiran data sasaran program SAMISAKE (keluarga miskin), agar KK miskin yang belum menerima manfaat program, dapat diakomodir pada masa yang akan datang.
4. Sertifikasi Rumah dan Bantuan Modal dan Alsintan belum maksimal, oleh karenanya pada masa yang akan datang perlu pembinaan yang berkaitan dengan kelompok ekonomi produktif.
5. Belum dispesifikasikan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, dan oleh karenanya perlu memperoleh perhatian pada masa yang akan datang.
6. Belum optimalnya kemitraan antar stakeholder. Perlu dukungan yang maksimal dari lembaga terkait seperti; Pertanahan dan Perlistrikan maka perlu dilakukan MOU antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Agraria dan Tata ruang serta dengan PLN. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program SAMISAKE baik Provinsi maupun Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan Perlu lebih aktif lagi dalam mensukseskan Program ini.

3.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Lansia

Beberapa permasalahan pada Pemberdayaan Perempuan dan Penanganan Lanjut Usia adalah:

- 1) Secara umum, perempuan masih lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan

kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah.

- 2) Masih rendahnya Kesempatan perempuan dalam memperoleh pendidikan . Persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih besar persentasenya dibandingkan penduduk laki-laki baik di daerah perkotaan maupun perdesaan Sebaliknya, proporsi perempuan yang meraih pendidikan, lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini terutama terjadi di daerah perdesaan.
- 3) Rasio TPAK perempuan masih dibawah 1 dan masih lebih rendah dibandingkan TPAK lakilaki. Hal ini berarti bahwa persentase perempuan yang bekerja masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Rasio TPAK ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan.
- 4) Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan juga terlihat dari upah yang diterima pekerja. Upah pekerja laki-laki lebih besar dibandingkan upah pekerja perempuan dari tahun ke tahun meskipun jumlah upah yang diterima masing-masing terus meningkat.
- 5) Lapangan kerja yang semakin sempit mengakibatkan perpindahan penduduk ke wilayah lain dengan kesempatan kerja yang lebih besar, tidak terkecuali migrasi internasional ke luar negeri. Kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor seseorang bermigrasi untuk mendapatkan penghasilan lebih besar, antara lain dengan bekerja di luar negeri.

- 6) Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Dan persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperlihatkan kesempatan perempuan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki dalam pemerintahan.
- 7) Seiring dengan meningkatnya Usia harapan Hidup Provinsi Jambi, maka jumlah lansia pun terjadi peningkatan, terdapat permasalahan terkait lanjut usia yang dihadapi saat ini, yaitu : 1) Jumlah dan proporsi lansia semakin meningkat sudah 5 persen dari jumlah penduduk Jambi, diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan tahun 2035, 2) Tingkat pendidikan lansia yang masih tergolong rendah; 3) Tingkat kesehatan rendah sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang signifikan dan harus diprioritaskan; 4) Masih banyak lansia yang bekerja mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan dasar, 5) Belum adanya jaminan sosial bagi lansia.

3.1.8. Kebudayaan dan Pariwisata

Beberapa permasalahan bidang kebudayaan antara lain:

1. Besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.
2. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur.
3. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.
4. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya

pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.

5. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

3.1.9. Pemuda dan Olahraga

Permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi:

1. Kurangnya minat pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan.
2. Meningkatnya jumlah pemuda yang terlibat dalam jebakan NAPZA dan HIV/AIDS di sisi lain hal tersebut kurang diikuti dengan upaya-upaya mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya NAPZA dan HIV/AIDS tersebut.
3. Kurangnya pengembangan budaya olah raga di kalangan masyarakat luas.
4. Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi pemuda dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta tingkat pendidikan pemuda yang masih relatif rendah.
5. Belum optimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olah raga daerah.

6. Semakin berkurangnya ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.

3.1.10. Perekonomian Daerah

1. Menurunnya kinerja ekspor yang antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi; rendahnya infrastuktur ekspor seperti pelabuhan, peti kemas dan angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke pelabuhan; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), penurunan ekspor produk kayu olahan dan karena keterbatasan bahan baku, penurunan 2 komoditas ekspor karet dan sawit akibat turunnya permintaan impor dan menurunnya harga sawit dan karet berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jambi.
2. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
3. **Persaingan produk impor dan nilai tambah produk rendah.** Daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura dari Provinsi Jambi umumnya masih rendah, Petani di Jambi pada umumnya hanya melakukan kegiatan usaha tani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen, relatif jarang yang melakukan pengolahan lanjutan. sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Rendahnya nilai tambah produk tersebut disebabkan juga oleh beberapa hal, antara lain: a). Kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis olahan; b) Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen; c) Sistem Alih

Teknologi masih Lemah dan belum Tepat Sasaran; d) Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.

4. Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (innovation) terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Penerapan GHP (Good Handling Procedur) belum baik dan benar yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.
5. **Terbatasnya Akses terhadap layanan usaha permodalan** Permodalan petani dalam pembelian sarana produksi (pupuk dan obat-obatan) sehingga dampak peningkatan produktifitasnya tidak signifikan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal lemah, hal ini disebabkan (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat Perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersil lain (di luar agribisnis).
6. **Sistem Pemasaran Belum Optimal.** Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan atau infrastruktur yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.
7. **Ketidakmerataan investasi.** Investasi tidak merata menjadi masalah pemerataan pembangunan daerah di kabupaten kota

dalam provinsi Jambi. Yang menyebabkan disparitas perekonomian antar daerah. Hal ini menyebabkan perpindahan penduduk dan berdampak kepada pembangunan wilayah. Rendahnya kegiatan investasi/penanaman modal, rendahnya keterkaitan antar industri, serta masih rendahnya penggunaan teknologi dan kualitas SDM

8. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Peternakan, industri pariwisata dan ekonomi kreatif
9. Alihfungsi Lahan. Setiap tahun lahan–lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang beralih (konversi) ke subsektor lain seperti perkebunan sawit, sehingga luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura kecenderungan terjadi penurunan, jika tidak diikuti dengan pembukaan lahan – lahan baru.
10. Terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanaman.
11. Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
12. Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif dan tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang disebabkan antara lain karena rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

3.1.11. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya potensi bencana alam. Adanya kegiatan pengrusakan hutan seperti pembalakan liar dan perambahan hutan tentunya akan meningkatkan resiko bencana seperti: banjir, longsor, dan kekeringan. Kegiatan pengrusakan hutan akan mengganggu keseimbangan dan merusak ekosistem hutan yang salah satu fungsinya sebagai water catchment area. Meningkatnya resiko terhadap bencana alam juga terjadi karena bertambahnya area lahan kritis pasca kegiatan pertambangan dan perkebunan. Seringkali lahan pasca kegiatan perkebunan dan pertambangan yang telah kritis tidak diupayakan untuk dilakukan rehabilitasi.

2. Meningkatnya pencemaran udara, tanah, dan air .

Meningkatnya pencemaran udara, tanah, dan air disebabkan oleh kegiatan perkebunan, pertambangan (emas, batubara) liar baik oleh perusahaan maupun masyarakat secara individual. Masih banyaknya kegiatan pertambangan dan perkebunan yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai dengan AMDAL. Di samping itu kurangnya upaya rehabilitasi daerah pasca kegiatan pertambangan sebagai bentuk tanggung jawab dalam bentuk reklamasi kembali oleh pelaku pertambangan juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan pencemaran. Pencemaran pada tanah terjadi karena terdapat merkuri yang terkandung pada tanah akibat sisa proses penambangan emas. Hal tersebut terjadi pula karena kurang kontrol pemanfaatan lahan untuk pertambangan. Pencemaran juga terjadi di Sungai Batanghari akibat dari kurangnya pengelolaan pada keramba ikan dan pembuangan limbah usaha di sepanjang sungai Batanghari.

3. Menurunnya kapasitas Sumber Daya Alam. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Permasalahan lainnya adalah kegiatan distribusi hasil pertanian yang kurang efisien dan efektif karena terbentur dengan keterbatasan infrastruktur, masih rendahnya penggunaan teknologi, serta masih rendahnya kualitas SDM (petani) dalam mengembangkan kegiatan pertanian (kegiatan pertanian masih cenderung konvensional).

- 4. Menurunnya daya dukung lingkungan.** Penurunan daya dukung lingkungan berbasis ekosistem hutan, DAS, dan gambut lebih dominan dipengaruhi oleh intervensi kegiatan manusia baik untuk memenuhi kebutuhan domestiknya dan kegiatan usahanya. Konversi lahan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut merupakan permasalahan utama dalam penurunan daya dukung lingkungan. Ketidaktaatan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan tata ruang wilayah dari berbagai pihak merupakan masalah mendasar yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Jambi, sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penataan kebijakan tata ruang wilayah perlu diprioritaskan. Beberapa upaya tersebut merupakan bagian dari tindakan penegakan hukum (law enforcement) dan proses penataan hukum (law compliance) dalam pelaksanaan tata ruang wilayah.

5. Berkurangnya lahan perkebunan, pertanian, dan hutan.

Dengan berkurangnya lahan perkebunan, pertanian, dan hutan dapat menyebabkan berkurangnya kelestarian lingkungan akibat dari meningkatnya alih fungsi lahan. Adanya musim kemarau yang berkepanjangan dan pembukaan lahan dengan bakar juga membuat peningkatan kejadian kebakaran hutan yang menjadikan lahan hutan semakin berkurang.

6. Semakin berkurangnya kualitas lingkungan pesisir.

Provinsi Jambi memiliki dua Kabupaten yang memiliki pantai yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah penduduk yang mendiaminya dari tahun ke tahun meningkat pesat, menjadi beban sendiri bagi wilayah ini sehingga menimbulkan beragam pencemaran yang mengancam kelestariannya.

7. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya **fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa.**

3.1.12. Tata Pemerintahan

- 1. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan.** Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah.
- 2. Masih kurangnya kualitas peraturan daerah juga disebabkan oleh antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, ego sektoral yang tinggi dan dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam**

bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim. Di samping itu, akses dan mekanisme kontrol terhadap masukan-masukan masyarakat kepada DPRD juga belum dilakukan secara optimal, proses penyusunan daerah yang belum dilaksanakan secara partisipatif akan berimplikasi pada kesenjangan substansi peraturan daerah dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadilan. Dalam pelaksanaan evaluasi dan konsultasi peraturan daerah kabupaten kota juga masih dihadapkan dengan permasalahan koordinasi dan komunikasi. Pada tingkat penegakan hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, selain masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, juga belum didukung oleh kelembagaan penegak peraturan daerah, yaitu Polisi Paming Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memadai.

3. Upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan dan telah mulai menunjukkan hasilnya. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan lebih lanjut. Hal ini disebabkan masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/negara, bahkan selama tiga tahun terakhir tidak hasil LAKIP belum menunjukkan peningkatan yang berarti, sehingga kualitasnya masih perlu banyak pembenahan termasuk dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) serta penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, serta pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan aparaturnya.
4. Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh

keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat. Di samping itu, tindak lanjut hasil pengawasan internal, baik sebagai upaya perbaikan kinerja maupun upaya penegakan hukum, pada umumnya masih sangat rendah

5. Budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (*code of conduct*) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan *e-procurement* belum dapat dilaksanakan. Padahal, pengembangan dan penerapan *e-procurement* merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.
6. Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan **kualitas pelayanan public** yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Provinsi Jambi belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan

tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Jumlah SKPD yang telah melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat masih sangat terbatas dan tidak rutin. Selain itu penerapan standar pelayanan minimal dan penyusunan standar pelayanan public juga belum diterapkan. Adanya kebijakan daerah yang untuk dijadikan dasar hukum diperlukan, namun kondisinya pada saat ini baru pada taraf rancangan peraturan daerah, sehingga masih perlu tindak lanjut.

7. Para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Provinsi Jambi masih terkendala dengan bagai regulasi, system pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Oleh karena itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Meskipun mentalitas birokrat telah berubah dari mentalitas penguasa menjadi mentalitas pelayan masyarakat, perubahan itu diyakini belum cukup meluas di kalangan birokrasi. Sebagian besar birokrat kita masih belum menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang harus dipenuhi hak-haknya. Selanjutnya, manajemen pelayanan publik masih perlu pembenahan. Sebagian besar unit pelayanan public belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik.
8. **Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.** Meskipun berbagai kebijakan telah banyak dilakukan dan kemajuan pun telah dicapai, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi masih banyak dikeluhkan. karenanya masih banyak hal yang harus diselesaikan lebih lanjut. Permasalahan tersebut di atas timbul antara lain disebabkan oleh belum optimalnya penataan

kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pada akhirnya, hubungan kelembagaan antar unit kerja dan anta SKPD menjadi tidak produktif. Di samping itu, keberadaan lembaga non struktural yang semakin banyak jumlahnya, seperti badan, sekretariat, dan lainnya semakin menambah kerumitan dalam pengaturan kelembagaan, terutama dilihat dari sisi konflik kewenangan, dan beban anggaran daerah yang makin besar. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

9. Kualitas SDM aparatur belum dapat menunjang kinerja birokrasi yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh praktik manajemen kepegawaian yang belum sepenuhnya menerapkan sistem merit, mulai dari pengadaan pegawai, promosi dan mutasi, diklat, penilaian kinerja, hingga sistem penggajian dan pensiun. Pelaksanaan system pilkada langsung tampaknya memperburuk situasi. Masih banyak pejabat birokrasi yang kariernya ditentukan bukan oleh profesionalisme dan prestasi kerjanya, melainkan oleh kedekatan hubungannya dengan tokoh-tokoh politik di daerah.
10. Permasalahan lainnya, program dan kegiatan di lingkungan SKPD pada umumnya belum sepenuhnya disertai dengan indikator kinerja yang jelas sehingga sulit diukur pencapaian dan akuntabilitas kerjanya. Di samping itu, secara umum system akuntabilitas kinerja SKPD masih belum berjalan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, penganggaran,

penilaian kinerja, manajemen kinerja, hingga sistem sanksi dan penghargaan bagi kinerja SKPD.

11. Budaya patriakal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yang berhak memiliki peran independen dalam melakukan aktualisasi diri di bidang sosial dan politik, serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.
12. Partai politik belum menunjukkan kinerja parpol yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsifungsinya sebagai parpol, yaitu agregasi dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Selain itu Parpol pun menghadapi beberapa persoalan internal organisasinya, seperti saranan dan rasaran penunjang organisasi, konflik internal dalam pergantian kepengurusan, belum berjalan optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya kemampuan dan kapasitas SDM kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktikkan dasar-dasar demokrasi, dan lemahnya sistem demokrasi internal dalam partai politik. Akibatnya kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi berkurang.
13. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik, dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tieak terlepas dari masalah penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik yang masih sampai saat ini masih mengalami berbagai kekurangan, akibat dari keterbatasan kapasitas

sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya. Di sisi lain kondisi saat ini mengindikasikan industri media yang berkembang masih didominasi oleh kepentingan profit/industri yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers.

14. Permasalahan Bersama tapal batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga . Diantaranya :

a) Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat :

- ✚ Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dengan Sumbar
- ✚ Potensi PAD yang terbatas, tetapi mampu menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata.
- ✚ Tatakelola keuangan
- ✚ Strategi Pencegahan Tipikor
- ✚ Manajemen Pengelolaan Otonomi Daerah.
- ✚ Angkutan Batubara/karet dari Prov. Jambi ke Pelabuhan Teluk Bayur Sumbar (kerusakan jalan dan potensi konflik)
- ✚ Potensi Konflik lahan masyarakat Kabupaten Bungo/Tebo dengan masyarakat Dharmasraya
- ✚ Perambahan TNKS
- ✚ Pembangunan jalur evakuasi bencana

b) Batas Provinsi Jambi dengan Kepulauan Riau

- ✚ Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri (batas perairan dan pulau berhala)
- ✚ Penanganan pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing.
- ✚ Potensi konflik nelayan antar Provinsi
- ✚ Strategi Pencegahan Tipikor
- ✚ Manajemen Pengelolaan Otonomi Daerah.

c) Batas Provinsi Jambi dengan Riau

- ✚ Penyelesaian batas Prov. Jambi (Kab. Tanjab Barat dan Tebo) dengan Prov. Riau.
- ✚ Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan.
- ✚ Potensi konflik Perambahan lahan Masyarakat Batak/Karo asal Riau di Kabupaten Tebo.
- ✚ Gangguan keamanan disepanjang lintas timur Jambi-Pekanbaru.
- ✚ Strategi Pencegahan Tipikor

d) Batas Provinsi Jambi Dengan Sumatera Selatan

- ✚ Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumsel
- ✚ Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan.
- ✚ Gangguan keamanan disepanjang jalur lintas timur Palembang-Jambi.
- ✚ Strategi Pencegahan Tipikor
- ✚ Manajemen Pengelolaan Otonomi Daerah.
- ✚ Perambahan TNKS
- ✚ Eksodus masyarakat Sumsel ke Kecamatan Jangkat (kawasan TNKS)
- ✚ Penanganan pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing.

e) Batas Provinsi Jambi dengan Bengkulu

- ✚ Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu
- ✚ Strategi Pencegahan Tipikor
- ✚ Manajemen Pengelolaan Otonomi Daerah.
- ✚ Potensi konflik perambahan lahan di Kab. Merangin (jangkat) dengan Prov. Bengkulu
- ✚ Perambahan kawasan TNKS

3.1.13. Keuangan Daerah

Fakta dan Permasalahan dari Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. **Penerimaan PAD Provinsi Jambi masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama** yang besarnya pada tahun 2010 mencapai 85 persen dari total penerimaan PAD Provinsi Jambi pada tahun tersebut.
2. **Adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota** yang disebabkan adanya perbedaan karakteristik potensi sumberdaya yang berbeda setiap wilayah. Kabupaten/Kota dengan kapasitas fiskal terbesar adalah Kota Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Bungo, sedangkan kapasitas fiskal terendah di Kabupaten Merangin.
3. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama tahun 2010 mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan **penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil**. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.
4. Di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dipenda Provinsi Jambi, **belum dapat segera mengetahui wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum melunasi pajaknya pada tahun bersangkutan**.

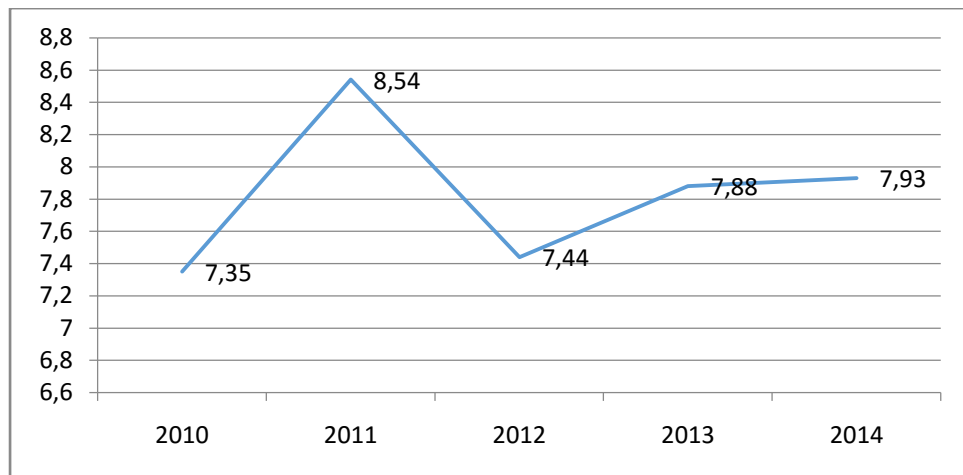
5. **Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak** terhadap peranan PKB dan BBN-KB sebagai sumber dana pembangunan daerah.
6. **Kewenangan di beberapa Samsat masih belum optimal.** Sedangkan status samsat telah menjadi Samsat penuh, seperti Samsat Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi dan Samsat Kabupaten Sarolangun.

3.2. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Aktivitas ekonomi yang semakin terbuka dewasa ini, pada akhirnya juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun internasional, baik itu menyangkut kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil, maupun pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh kondisi keuangan global yang diyakini akan berdampak berbagai aktivitas dan sektor ekonomi di daerah.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Provinsi Jambi pada Tahun 2010 - 2014 berfluktuasi pada kisaran 6,7 – 8,5 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 8,54 persen dan terendah pada tahun 2010 sebesar 7,35 persen. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS (data diolah), 2015

Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2014

Pada tahun 2014, peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi didukung oleh semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 12,91 persen; diikuti oleh sektor bangunan sebesar 9,74 persen; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 7,55 persen; sektor industri pengolahan 7,18 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi 6,52 persen; sektor jasa-jasa 6,28 persen; sektor pertanian 5,95 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1,13 persen. Sedangkan sektor ekonomi yang laju pertumbuhan ekonominya terkecil pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,65 persen.

Besarnya sumbangan masing-masing sektor dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki nilai nominal besar, walaupun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil. Sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 12,91 persen mampu menyumbang total pertumbuhan Provinsi Jambi sebesar 2,42 persen. Demikian

pula halnya dengan sektor pertanian yang menyumbang total pertumbuhan sebesar 1,75 persen dengan pertumbuhan 5,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut memiliki potensi yang sangat besar di Provinsi Jambi.

PDRB Provinsi Jambi tahun 2014, berdasarkan penggunaan atau permintaan yang digerakkan oleh beberapa komponen permintaan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pertumbuhan tertinggi pada komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba yang mencapai 20,55 %, diikuti oleh ekspor barang dan jasa dengan laju pertumbuhan sebesar 8,75 % dan pembentukan modal tetap bruto dengan laju pertumbuhan mencapai 5,68 %.

Geliat ekonomi dan perdagangan Provinsi Jambi yang terus tumbuh dengan baik, dan menjadi daya tarik investor luar, juga ditunjukkan dengan meningkatnya pengedaran uang tunai dan transaksi giralisasi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jambi ini, telah menarik minat dunia perbankan untuk membuka operasionalisasinya di Jambi, yang sampai saat ini berdasarkan Jurnal Bank Indonesia Tahun 2014 di Provinsi Jambi terdapat 379 kantor bank, yang terdiri dari 1 (satu) kantor pusat, 58 kantor cabang, 253 kantor cabang pembantu, 67 kantor kas. Sedangkan kantor BPR tercatat 30 kantor. Rincian PDRB Atas Harga Berlaku Konstan dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.1
Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar harga Berlaku di Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2014

Sektor	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	PDRB ADHB	PDRB ADHK	PDRB ADHB	PDRB ADHK	PDRB ADHB	PDRB ADHK	PDRB ADHB	PDRB ADHK	PDRB ADHB	PDRB ADHK	PDRB ADHB	PDRB ADHK
PERTANIAN	12,113,078	5,003,441	15,814,677	5,262,856	18,583,306	5,580,225	21,675,418	6,004,284	25,398,690	6,449,193	29,049,883	6,832,132
PERTAMBANGAN & PENGALIAN	8,078,599	1,875,312	9,817,272	2,146,442	12,067,110	2,644,186	12,626,675	2,713,435	13,670,412	2,755,755	14,536,669	2,766,851
INDUSTRI PENGOLAHAN	5,258,205	2,137,363	5,981,287	2,233,275	6,747,658	2,347,523	7,923,521	2,532,924	9,136,487	2,677,094	10,630,530	2,869,209
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	368,043	128,646	487,976	145,524	587,747	162,266	669,265	172,609	820,729	188,614	974,575	202,849
KONSTRUKSI	2,146,260	782,475	2,446,569	835,368	2,708,468	888,073	3,492,642	1,031,629	4,873,573	1,245,510	5,854,296	1,366,857
PERDAG., HOTEL & RESTORAN	6,428,163	2,764,830	7,827,668	3,046,733	9,476,118	3,340,709	11,459,738	3,673,985	14,525,185	4,123,669	18,105,516	4,655,916
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	3,040,655	1,268,175	3,518,812	1,320,270	4,024,682	1,373,393	4,621,533	1,473,275	5,399,017	1,598,822	6,244,182	1,703,058
KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	2,283,433	889,519	2,783,618	997,305	3,259,985	1,087,897	3,748,432	1,172,817	4,467,545	1,265,251	4,937,931	1,279,521
JASA-JASA	4,410,571	1,425,146	5,138,814	1,482,880	5,900,240	1,539,245	6,436,940	1,598,574	7,266,675	1,675,370	8,408,696	1,780,547
PDRB	44,127,006	16,274,908	53,816,693	17,470,653	63,355,314	18,963,518	72,654,165	20,373,533	85,558,314	21,979,277	98,742,278	23,456,940

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Tabel 3.2
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Provinsi
Jambi Tahun 2009 - 2013 (Persentase)

Sektor	Distribusi PDRB pada Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PERTANIAN	27.45	29.39	29.33	29.83	29.69	29.42
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	18.31	18.24	19.05	17.38	15.98	14.72
INDUSTRI PENGOLAHAN	11.92	11.11	10.65	10.91	10.68	10.77
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0.83	0.91	0.93	0.92	0.96	0.99
KONSTRUKSI	4.86	4.55	4.28	4.81	5.7	5.93
PERDAG., HOTEL & RESTORAN	14.57	14.55	14.96	15.77	16.98	18.34
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	6.89	6.54	6.35	6.36	6.31	6.32
KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	5.17	5.17	5.15	5.16	5.22	5
JASA-JASA	10	9.55	9.31	8.86	8.49	8.52

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

b. Inflasi

Kinerja ekonomi Provinsi Jambi salah satunya juga ditunjukkan dengan angka inflasi. Laju inflasi Kota Jambi pada tahun 2014 berada pada posisi 8,72 persen. Inflasi terjadi pada semua kelompok barang dan jasa karena adanya kenaikan indeks kelompok bahan makanan sebesar 3,11 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,50 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 2,00 persen; kelompok sandang sebesar 0,43 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,35 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,37 persen; dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 5,63 persen. Secara rinci dapat dilihat pada di bawah ini

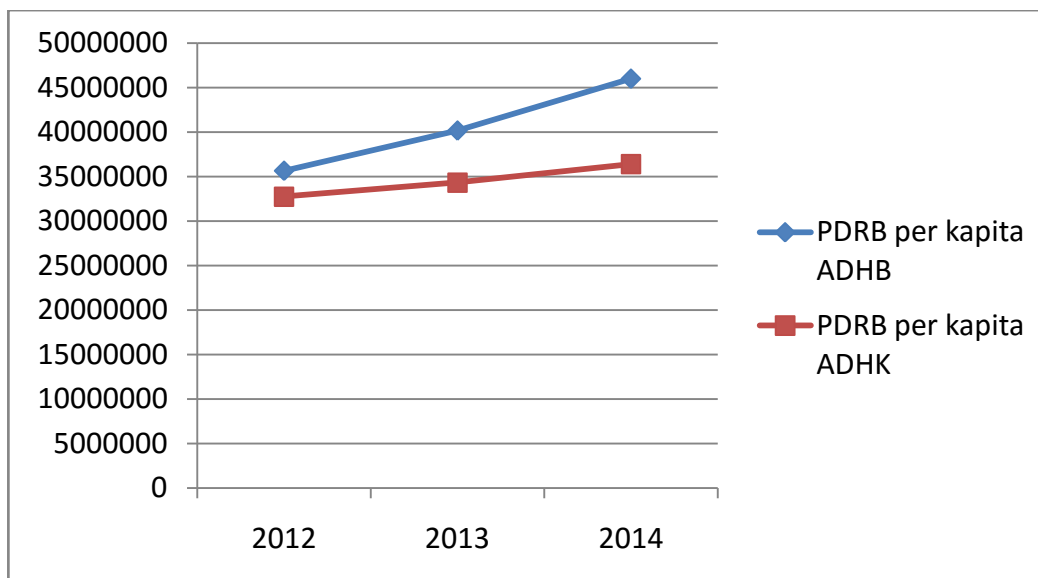
Tabel 3.3
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year Tahun 2013 - 2014

No	Inflasi	2013	2014
1	Desember	0,40	2,61
2	Desember (Tahun Kalender)	8,74	8,72
3	Desember terhadap Desember (year on year)	8,74	8,72

Sumber: Berita Resmi BPS 2015

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro dan didefinisikan sebagai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah. Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 11/02/15/Th.IX tanggal 5 Februari 2015, PDRB per kapita Provinsi Jambi Tahun 2014 atas dasar Harga Berlaku dengan Tahun Dasar 2010 adalah sebesar Rp.46.004.118,00 atau naik sebesar 14,51 % dibanding tahun 2013. Sedangkan PDRB perkapita Tahun 2014 atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 adalah sebesar Rp.36.407.971,00 atau naik sebesar 6,05 % dari tahun 2013. Perkembangan PDRB per kapita Provinsi Jambi Tahun Dasar 2010 Tahun 2012 – 2014 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BRS BPS (data diolah), 2015

Gambar 3.2

PDRB per kapita Provinsi Jambi Tahun Dasar 2010 Tahun 2012 - 2014

Tabel 3.4
PDRB Perkapita atas dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi tahun 2010 – 2013

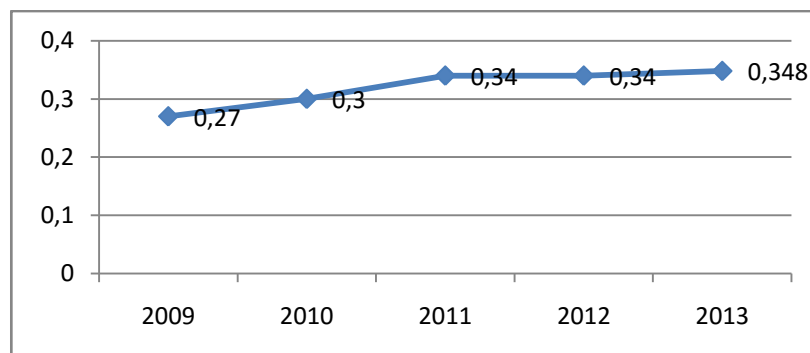
Kabupaten	2010	2011	2012	2013
Kerinci	13,377,098	14,953,451	17,093,240	23.844.190
Merangin	9,798,304	11,296,614	12,904,024	18.877.127
Sarolangun	16,153,487	18,489,457	20,695,887	19,949.430
BatangHari	16,058,754	19,005,250	21,110,177	14.800.465
Muaro Jambi	11,609,632	13,177,643	15,120,834	17.214.030
Tanjung Jabung Timur	43,946,352	49,389,222	56,654,065	63.067.781
Tanjung Jabung Barat	24,152,244	27,486,747	30,640,463	34.771.730
Tebo	8,796,891	10,140,080	10.926.749	12.321.001
Bungo	13,307,567	15,303,277	17,003,432	12.438.877
KotaJambi	17,123,768	19,381,167	22,178,455	26.113.913
Kota Sungai Penuh	18,451,352	20,600,467	23,613,004	27.055.572

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dalam JDA Tahun 2014.

Bila dilihat PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi maka terlihat bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi selama tahun 2010 – 2013. Hal ini disebabkan karena kabupaten ini merupakan daerah penghasil migas terbesar di Provinsi Jambi. Rincian PDRB per kapita atas dasar berlaku menurut kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

d. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

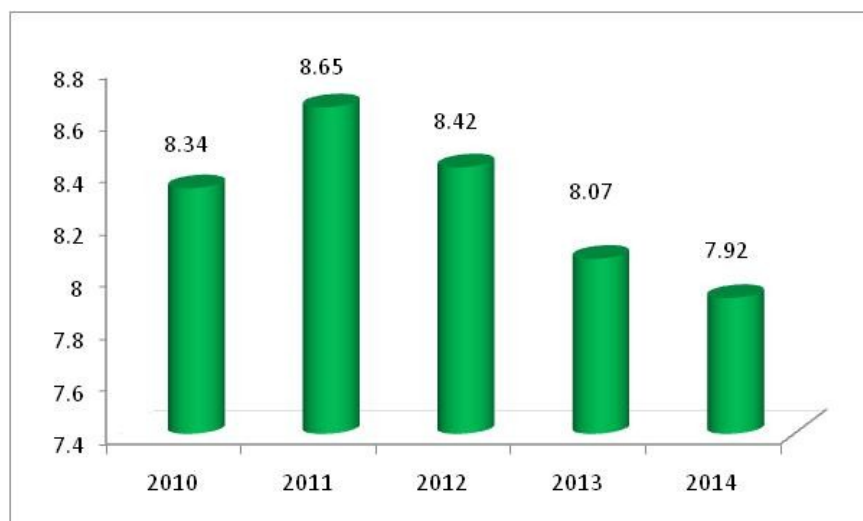
Gambar 3.3
Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2009-2013

Perkembangan Indeks Gini di Provinsi Jambi selama tahun 2009-2013 menunjukkan angka yang semakin meningkat. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Jambi yang cukup besar. Indeks Gini pada tahun 2009 sebesar 0.27 meningkat

menjadi 0.348 pada tahun 2013. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Jambi bergerak dari ketimpangan rendah menjadi ketimpangan sedang sejak tahun 2010. Grafik perkembangan Indeks Gini di Provinsi Jambi selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada **Gambar** di bawah atas.

e. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Jambi dari Tahun 2010 ke Tahun 2014 menunjukkan trend menurun. Dimana sempat naik dari 8,34 % Maret 2010 menjadi 8,65 % pada tahun 2011, kemudian turun sampai dengan 7,92 % pada tahun 2014. Hal ini berarti bahwa persentase penduduk di atas garis kemiskinan meningkat. Perkembangan persentase penduduk di abawah garis kemiskinan terlihat pada Gambar di bawah ini:

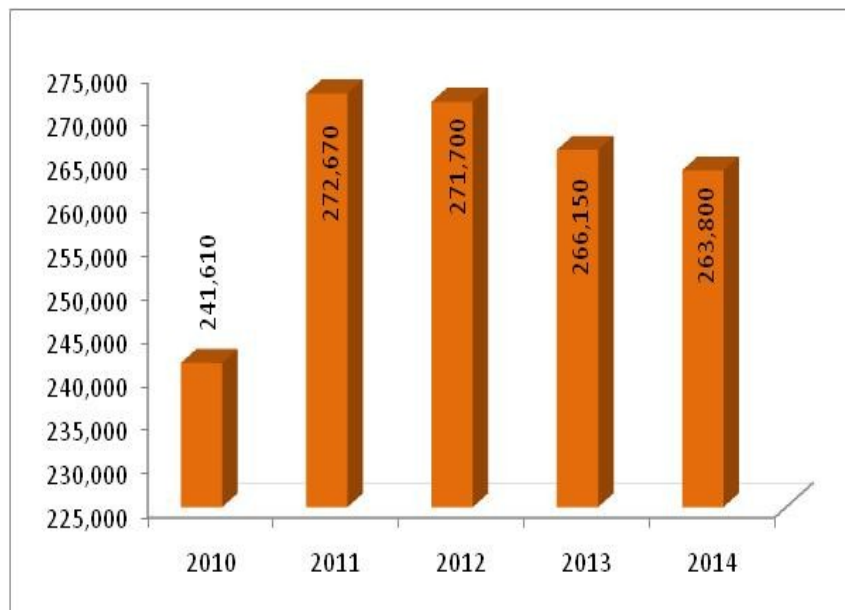


Sumber : BPS Provinsi Jambi

Gambar 3.4

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010 s/d Tahun 2014

Begitu juga secara jumlah, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Jambi dari Tahun 2010 ke Tahun 2014 juga menunjukkan trend menurun. Dimana sempat naik dari 241.610 jiwa pada tahun 2010 menjadi 272.670 jiwa pada tahun 2011, kemudian turun menjadi 263.800 jiwa pada tahun 2014. Sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini:



Sumber : BPS Provinsi Jambi

Gambar 3.5

Trend Angka Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010 s/d Tahun 2014

Dari Grafik di atas, terlihat bahwa meskipun angka kemiskinan Provinsi Jambi juga dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan situasi internasional antara lain yaitu; kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (USD), kenaikan tarif dasar listrik, yang memicu terjadinya kenaikan tarif angkutan dan tarif PDAM yang berdampak langsung pada meningkatnya laju inflasi, namun berkat intervensi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/kota, angka kemiskinan di Provinsi dapat menurun.

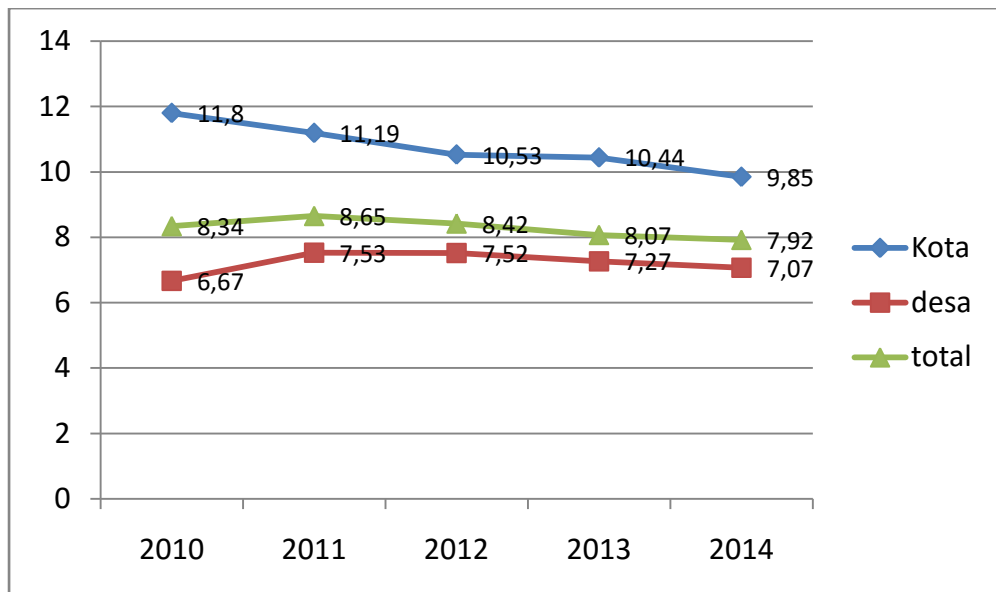
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi selama tahun 2009-2013 cenderung konstan. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 263,8 Ribu (7.92 %, namun masih diatas rata – rata angka nasional sebesar 11.25 %. Secara rinci dapat dilihat pada **Tabel**

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2014

Tahun/Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
2010/Mar	110.8	130.8	241.6	11.8	6.67	8.34
2011/Mar	108.2	164.6	272.8	11.19	7.53	8.65
2011/Sept	97.1	154.3	251.4	9.95	7.53	7.9
2012/Mar	103	167.4	270.4	10.44	7.52	8.42
2012/Sept	104.7	163.8	268.5	10.53	7.29	8.28
2013/Mar	99.2	164.8	264	9.88	7.27	8.07
2013/Sept	104.9	172.8	277.7	10.41	7.54	8.41
2014/Mar	100.1	163.7	263.8	9.85	7.07	7.92

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2014

Sedangkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi tahun 2009 - 2014 sebagian besar berada di Perkotaan (9,85 % pada tahun 2014) dibandingkan Perdesaan (7.07 % pada tahun 2014). Secara terinci dilihat pada **Gambar**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Gambar 3.6 Persentase Penduduk Miskin Kota dan Desa di Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 (%)

Persentase kemiskinan Provinsi Jambi apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah sumatera tahun 2014 berada pada urutan ke-4 (empat) dan masih diatas rata – rata nasional. Secara rinci dapat dilihat pada **Tabel**

Tabel 3.6
Kemiskinan nasional dan Provinsi se Sumatera
Tahun 2012 – 2014

No	Provinsi/Nasional	2014		2013		2012	
		(%)	Ribu Jiwa	(%)	Ribu Jiwa	(%)	Ribu Jiwa
1	Bangka Belitung	5.36	71.64	5.53	70.75	5.21	68.14
2	Kepulauan Riau	6.70	127.80	7.11	127.41	6.46	119.31
3	Sumatera Barat	7.41	379.20	8.19	407.95	8.14	411.12
4	Jambi	7.92	263.80	8.42	270.43	8.07	264.00
5	Riau	8.12	499.89	8.22	479.83	7.72	462.67
6	Sumatera Utara	9.38	1,286.67	10.67	1,425.77	10.06	1,362.39
7	Sumatera Selatan	13.91	1,100.83	13.78	1,059.13	14.24	1,110.53
8	Lampung	14.28	1,142.92	16.18	1,264.48	14.86	1,175.35
9	Bengkulu	17.48	320.95	17.70	314.35	18.34	331.36
10	Aceh	18.05	881.26	19.46	912.92	17.60	842.42
	Nasional	11.25	28,280.01	11.96	28,169.22	11.36	29,251.08

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Periode Maret 2014.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Matrik Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi tahun 2016

No	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas				
1	Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik	Terbangunnya konektivitas PKN, PKW dan PKL dalam kerangka Jalan Primer	Pengembangan dan penataan fasilitas infrastruktur yang telah dibangun	Mensinergiskan sistem infrastruktur dengan konsep tata ruang wilayah
				Mengharmonisasi keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah
		Terbangunnya Simpul-simpul Maritim Provinsi Jambi	Peningkatan peran pelabuhan eksisting dan percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	Peningkatan sarana prasarana pelabuhan
		Terbangunnya infrastruktur penunjang Rail way (satasiun – pusat simpul, toll way)	Mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagai landasan pembangunan	Mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagai landasan pembangunan
		Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air	Ketersediaan jaringan irigasi dan kebutuhan air bersih yang merata	Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendaya gunaan

				Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi
				Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis
			Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung sistem jaringan irigasi di wilayah potensi	Penyelenggaraan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis partisipasi masyarakat
				Penataan system irigasi dalam mendukung peningkatan pemanfaatan lahan dan produksi pertanian
				Meningkatkan upaya pengendalian kecenderungan

				alih fungsi lahan, dengan mengoptimalkan sistem jaringan irigasi yang telah ada dan yang akan dibangun
		Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan terbarukan	Pengembangan Energi Menciptakan alternatif dari Potensi setempat dan Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumberdaya

				energi
		Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar
		Meningkatnya pembangunan infrastruktur Ujung Jabung	Percepatan pembangunan infrastruktur Ujung Jabung	Mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagai landasan pembangunan
				Menarik investor agar menginvestasikan modalnya untuk pembangunan Ujung Jabung
Misi 2. Mewujudkan peningkatan SDM yang berdaya saing dan berbudaya				
	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang berbudaya.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata	Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik dengan mengikuti standar Pendidikan nasional	1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program WAJAR Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan

				menengah yang berkualitas
				Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik
				Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat (miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat)
				Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel untuk melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana kesehatan dan	perluasan dan pemerataan sarana prasarana kesehatan yang baik dan

			tenaga kesehatan dengan mengikuti standar nasional	terjangkau
		Meningkatnya kualitas Tenaga kerja	melaksanakan program – program yang berhubungan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan pelatihan bagi angkatan kerja Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam program magang bagi angkatan kerja sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja
		Mewujudkan peran pemuda dalam pembangunan yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi dan kualitas manusia daerah Jambi Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga

				keolahragaan
				Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga dalam memacu prestasi dan prestise daerah
		Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
				Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial
				Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan

				sosial
				Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial
		Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas	Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan	Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB
				Memperkuat kelembagaan dan jaringan KB dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas
		Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan	Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah	Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas Provinsi Jambi
				Mengembangkan

				modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan
				Menjadikan budaya lokal sebagai salah satu alat promosi daerah dengan mengedepankan budaya leluhur
		Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;	Menggali kebudayaan lokal dan mengelolanya dengan baik sebagai sumberdaya untuk meningkatkan daya saing pariwisata	Menumbuhkan grup – grup seni lokal
		terlaksananya partisipasi dan kesadaran yang tinggi di semua lapisan masyarakat akan pentingnya kelestarian dan perlindungan kawasan dan cagar budaya, serta tumbuh dan berkembangnya 'kantong-kantong' kebudayaan yang berbasis masyarakat di	Pemberdayaan masyarakat dalam penumbuhan sadar budaya	Mengoptimalkan pelaksanaan Program – program pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata

		seluruh wilayah Propinsi Jambi.		
		peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta perluasan perwujudan provinsi berbasis teknologi informasi pada setiap Kabupaten/Kota	Menciptakan jejaring ilmu pengetahuan dan penelitian	Perwujudan technopark dan science park
Misi 3. Meningkatkan Struktur Ekonomi yang kokoh dan bernilai tambah dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi				
3	Meningkatkan Struktur Ekonomi yang kokoh dan bernilai tambah dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatnya kontribusi sektor sekunder dalam PDRB	Pengembangan sektor – sektor sekunder di Provinsi Jambi	Menciptakan daya tarik investasi sektor sekunder dengan melengkapi sarana prasarana pendukung
		Pembangunan bidang industri dan perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif,		
		Pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan	Mengembangkan inovasi dalam hal peningkatan dan perluasan pasar produk dalam negeri	Pemberdayaan koperasi dan UMKM

		perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri.		
		Pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir dalam rangka meningkatkan mutu produk-produk pertanian Jambi	Pemanfaatan hasil kajian pengembangan teknologi produksi	mengembangkan teknologi tepat guna yang adaptif
		pengembangan perikanan Jambi diarahkan pada penumbuhan perikanan komersial di Pantai Timur dan potensi perairan umum	Penumbuhan perikanan komersial di Pantai Timur, potensi perairan Sungai Batanghari, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha pengolahan hasil, penguatan pasar untuk industri hilir,	Pemberian stimulan pengembangan perikanan di Provinsi Jambi
Misi 4. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, Mandiri dan berkelanjutan				
	Pembangunan daerah dilakukan	Peningkatan percepatan pembangunan	Melengkapi seluruh dokumen	Percepatan penyelesaian RTR Kawasan

	secara berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat dapat sinergis, serasi dan seimbang	dan pertumbuhan kawasan strategis sehingga dapat mengembangkan daerah-daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas administrasi namun lebih menekankan keterkaitan mata rantai proses agroindustri	perencanaan yang dibutuhkan untuk percepatan investasi	Strategis
		menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata dan terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam.	Diversifikasi pangan lokal	Pengembangan tanaman pangan lokal
		peningkatan peran aktif	Memberdayakan lembaga	Menumbuhkan kelompok –

		dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal, penerapan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal, serta semakin lengkap dan memadainya sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan.	swadaya masyarakat dalam pendampingan masyarakat	kelompok pengelola lingkungan
		penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah, dan menjaga kesinambungan fiskal daerah.	Membangun wilayah sesuai dengan arahan tata ruang wilayah	Penguatan peran PKN, PKW dan PKL
Misi 5. Mewujudkan peningkatan Good Government dan Demographic Government.				
	Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan serta mewujudkan perluasan partisipasi public dalam	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	Terciptanya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Menciptakan kondisi kerja yang baik yang didukung dengan kemampuan SDM perencana yang berkualitas dalam mengimplementasikan dokumen

	pembangunan daerah			perencanaan secara sinergi sesuai dengan peraturan yang berlaku
				Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah
				Tersusunnya konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa study yang baik
			Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di semua sektor sehingga pelaksanaan birokrasi pemerintahan dapat diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan etos kerja birokrasi serta	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pencapaian good governance dan clean government yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan

			budaya kerja yang memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	aparatur
				Pembentukan birokrasi yang profesional dengan membangun aparatur pemerintah Provinsi Jambi yang memahami etika birokrasi dan budaya kerja, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta penerapan komitmen percepatan pemberantasan KKN
				meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi
				Peningkatan intensitas dan

				efektivitas pengawasan aparaturnya melalui pengawasan internal, fungsional, DPRD, dan pengawasan masyarakat
		Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparaturnya	Meningkatkan kapasitas dan kualitas kesejahteraan sumber daya aparaturnya	Pemberian beasiswa jenjang S2 dan S3 bagi aparaturnya
				Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan berdasarkan kinerja
		Meningkatnya peran serta Masyarakat dan pemangku Kepentingan dalam proses pembangunan	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting pembangunan	Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
	Meningkatkan stabilitas daerah	Meningkatnya stabilitas Ketertiban , ketentraman dan kesadaran politik dan hukum masyarakat	Menciptakan budaya kerja yang berdasarkan pada ketaatan akan hukum dan perundang-undangan	Menghormati supremasi hukum, melalui perilaku keteladanan aparaturnya pemerintahan dalam mematuhi dan menaati hukum
				Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan

				perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan
				Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil
	Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	Pemenuhan standar minimal pelayanan publik	Standarisasi sistem pelayanan publik
		peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi serta memperluas kerjasama investasi antar wilayah/daerah.	Meningkatkan kepastian hukum bidang investasi	Efisiensi aturan investasi dengan tidak mengurangi kepentingan seluruh sektor
		peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah.	Inventarisasi dan promosi kerjasama pengelolaan aset dan kekayaan daerah	Perbaikan tata kelola aset dan kekayaan daerah
		optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan	Mewujudkan kelembagaan dan ketata laksanaan	Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah

		belanja daerah.	pemerintahan, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	daerah melalui optimalisasi sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan
				Pengembangan sistem informasi terpadu (e-government) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan

BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN PROVINSI JAMBI

4.1. Rencana Kinerja untuk Pencapaian sasaran dari Misi Pertama

Misi 1 : Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan umum daerah dan regional, infrastruktur penunjang simpul – simpul maritim, pembangunan infrastruktur energi dan listrik, serta terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap	76,18 %
		2. Persentase jalan provinsi yang mempunyai drainase	20,35%
		3. Persentase peningkatan nilai ekspor melalui pelabuhan Jambi	2 %
		4. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	73,0 %
		5. Rasio elektrifikasi	82 %
		6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	65%
		7. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	73%
		8. Persentase pembebasan lahan menuju Ujung JAbung	80%

4.2. Rencana Kinerja untuk Pencapaian sasaran dari Misi Kedua

Misi 2 : Mewujudkan peningkatan SDM yang berdaya saing dan berbudaya

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	meningkatnya akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kerja, perlindungan dan kesejahteraan social serta peran pemuda dalam pembangunan	1. Angka rata-rata lama sekolah	8,4 th
		2. Rasio SMA dan SMK	65 : 35
		3. Angka melanjutkan ke perguruan tinggi	13 %
		4. Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,7
		5. Persentase Kecamatan yang mempunyai Puskesmas yang terakreditasi	10,76%
		6. Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS kesehatan	40%
		7. Persentase persalinan yang dibantu tenaga kesehatan	55 %
		8. Angka gizi kurang	12 %
		9. Persentase penganggur terdidik	28,5%
		10. Persentase Angkatan kerja Konstruksi yang telah disertifikasi Profesi	5,8%
		11. Persentase Angkatan kerja non konstruksi yang telah disertifikasi Profesi	0,2%
		12. Persentase peningkatan SP3	10%
		13. Rangking Provinsi Jambi dalam PON	24
		14. Persentase peningkatan grup kesenian	2%

4.3. Rencana Kinerja untuk Pencapaian sasaran dari Misi Ketiga

Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah
Provinsi : Jambi
Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan kontribusi sektor sekunder melalui peningkatan investasi daerah, pengembangan kawasan Ujung Jabung dan pengembangan sumberdaya perikanan	1. Peningkatan Nilai investasi PMA	3,5%
		2. Peningkatan Nilai investasi PMDN	6%
		3. Persentase kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	17,5%
		4. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian	4,5%

4.4. Rencana Kinerja untuk Pencapaian sasaran dari Misi Keempat

Misi 4 : Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, mandiri dan berkelanjutan
Provinsi : Jambi
Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pembangunan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan daerah serta mengembangkan kehidupan yang berkelanjutan (<i>sustainable livelihood</i>) dengan meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan	• Skor Pola Pangan Harapan	85
		• Persentase capaian produksi beras yang ditargetkan pemerintah pusat	85%
		• Indeks Williamson	0,38
		• Gini Ratio	0,34
		• Persentase kecamatan yang diberi pendampingan kewirausahaan	10%

4.5. Rencana Kinerja untuk Pencapaian sasaran dari Misi Kelima

Misi 5 : Mewujudkan peningkatan *good government* dan *democratic government*
Provinsi : Jambi
Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta kualitas pelayanan publik	1. Nilai SAKIP	Baik (B)
		2. Persentase kabupaten/kota dengan nilai SAKIP baik	54,55%
		3. Persentase peningkatan pegawai tamatan S2 dan S3	8,9%
		4. Tingkat kehadiran perwakilan masyarakat dalam konsultasi publik perencanaan pembangunan	60%
		5. Persentase peningkatan pengaduan masyarakat	5 %
		6. Persentase peningkatan dana CSR	7%
		7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
		8. Hasil audit BPK terhadap penilaian laporan keuangan daerah	WTP
		9. Persentase kabupaten/kota mendapat nilai WTP terhadap penilaian laporan keuangan daerah	45,45%

BAB V

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS

5.1. Rencana Kebutuhan Dana Program Prioritas untuk Pencapaian sasaran dari Misi Pertama

Misi 1 : Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas
Provinsi : Jambi
Tahun Anggaran : 2016

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.juta)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan umum daerah dan regional, infrastruktur penunjang simpul – simpul maritim, pembangunan infrastruktur energi dan listrik, serta terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	- Persentase jalan dalam kondisi mantap - Persentase jalan provinsi yang mempunyai drainase - Persentase pembebasan lahan menuju Ujung Jabung	76,18% 20,35% 80%	1. Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan 2. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 3. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan 4. Program Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang infrastruktur ke-PU-an	602.554,0 15.126,25 1.890,0 14.630,7	PU Dishub Dishub PU
		Persentase peningkatan nilai ekspor melalui pelabuhan Jambi	2 %	1. Program peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri	635	Dinas Perindag

1	2	3	4	5	6	7
				2. Program pengembangan standarisasi nasional	1.310,43	Dinas Perindag
		• Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	73%	1. Program pengembangan dan pengelolaan, irigasi, rawa dan jaringan pengairan	49.500	PU
		• Rasio elektrifikasi	82%	1. Program pengembangan energi	5.829,93	ESDM
		• Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	65%	1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	855,23	Dinkes
				2. Program Pengembangan perumahan dan permukiman	21.854,72	PU
				3. Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman	28.122,35	PU
		• Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan.	73%	1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	38.689	PU

Jumlah Anggaran tahun 2016 adalah **Rp. 780,998 Milyar**

5.2. Rencana Kebutuhan Dana Program Prioritas untuk Pencapaian

sasaran dari Misi Kedua

Misi 2 : Mewujudkan peningkatan SDM yang berdaya saing dan berbudaya

Provinsi : Jambi

Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kerja, perlindungan dan kesejahteraan social serta peran pemuda dalam pembangunan	• Angka Rata-rata Lama Sekolah • Rasio SMA dan SMK • Angka melanjutkan ke Perguruan tinggi	8,4 Tahun 8,5 Tahun 99%	1. Program Pendidikan Non Formal 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menenga 4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6. Program Pendidikan Luar Biasa	11.049,64 23.784,5 110.592,52 23.500 21.906,72 15.860	Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik

1	2	3	4	5	6	7
		• Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat • Persentase puskesmas yang terakreditasi • Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS kesehatan • Persentase persalinan dibantu tenaga kesehatan • Angka gizi kurang	0,7 10,76% 40% 55% 12%	1. Program Upaya Kesehatan Perorangan 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Program Perbaikan gizi masyarakat 5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi) 6. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 7. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 8. Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak	18.656 881,08 1.201,56 889 233,7 220 608 1.253,7	Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

1	2	3	4	5	6	7
				9. Program Pengadaa n, Peningkata n Sarana dan Prasarana RS/ RSJ/ RS Paru- paru/ RS Mata 10. Program Pemelihar aan Sarana dan Prasarana RS/ RSJ/ RS Paru- paru/ RS Mata	71.495 3.575	RSJ dan RSUD RSJ dan RSUD
		• Persentase penganggur terdidik • Persentase angkatan kerja konstruksi yang telah disertifikasi profesi • Persentase angkatan kerja non konstruksi yang telah disertifikasi profesi	28,5% 5,8% 0,2%	1. Program peningkata n kesempata n kerja 2. Program peningkata n kualitas dan produktivit as tenaga kerja 3. Program pengatura n jasa konstruksi 4. Program pemberda yaan jasa konstruksi 5. Program pengawas n jasa konstruksi	1.414 3.625 1.200 1.510 4.090	Dinas Sosnak ertrans Dinas Sosnak ertrans Dinas PU Dinas PU Dinas PU

1	2	3	4	5	6	7
		Persentase peningkatan SP3	10%	1. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	5.451,05	Dispora
		Rangking Provinsi Jambi dalam PON	24	1. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 3. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 4. Program kebijakan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan	211,72 6.584,65 1.229,98 840,29	
		Persentase peningkatan grup kesenian	2%	1. Program pengelolaan keragaman budaya 2. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	971,17 878,51	Dinas Budpar Dinas Budpar

1	2	3	4	5	6	7
				3. Program pengembangan kemitraan	750	Dinas Budpar

Jumlah Anggaran tahun 2016 adalah **Rp. 334,463 Milyar**

5.3. Rencana Kebutuhan Dana untuk Pencapaian sasaran dari Misi Ketiga

Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah
Provinsi : Jambi
Tahun Anggaran : 2016

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan kontribusi sektor sekunder melalui peningkatan investasi daerah, pengembangan kawasan Ujung Jabung dan pengembangan sumberdaya perikanan	• Peningkatan nilai Investasi PMA • Peningkatan Nilai Investasi PMDN • Persentase kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	3,5% 6% 17,5%	1. Program kemudahan tata kelola dan kerjasama investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3. Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 5. Program Pengembangan industri kecil dan menengah 6. Program Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri	2.692 750 474,75 1.115,91 2.194,29 635	BPMD dan PPT BPMD dan PPT BPMD dan PPT Dinas Perindag Dinas Perindag Dinas Perindag

1	2	3	4	5	6	7
		•		7. Program Pengembangan industri agro dan kimia 8. Program Peningkatan efisiensi Perdagangan dalam negeri 10. Program Pengembangan Standarisasi Nasional	465 1.175,94 1.310	Dinas Perindag Dinas Perindag Dinas Perindag
		• Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian	4,5%	1. Program pengawasan SDKP, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir 2. Program Pengembangan Perikanan. budidaya 3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4. Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.993,28 9.132,9 4.084,45 2.930	DKP DKP DKP DKP

Jumlah Anggaran tahun 2016 adalah **Rp. 8,327 Milyar**

5.4. Rencana Kebutuhan Dana untuk Pencapaian sasaran dari Misi Keempat

Misi 4 : Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, mandiri dan berkelanjutan
Provinsi : Jambi
Tahun Anggaran : 2016

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.juta)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pembangunan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan daerah serta mengembangkan kehidupan yang berkelanjutan (<i>sustainable livelihood</i>) dengan meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan	• Skor Pola Pangan Harapan • Persentase capaian produksi beras yang ditargetkan pemerintah pusat	85 85%	1. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) 2. Program Peningkatan Kesejahteraan petani 3. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	3.778,78 613,7 2.855,59 2.417,45 6.968,18	BKP Bakorluh Bakorluh Dinas Pertanian Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6	7
				6. Program peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor hasil industri hilir pemasaran	1.007,05	Dinas Pertanian
				7. Program pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	2.000	Dinas Peternakan
				8. Program peningkatan produksi peternakan	4.300	Dinas Peternakan
				9. Program peningkatan kesehatan masyarakat veteriner	2.150	Dinas Peternakan
		• Indeks Williamson • Gini Ratio • Persentase kecamatan yang diberi pendampingan kewirausahaan	0,38	10. Program peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk perkebunan	2.404,26	Disbun
			0,34 10%	11. Program peningkatan produksi dan teknologi budidaya perkebunan	25.308,53	Disbun

1	2	3	4	5	6	7
				12. Program peningkatan usaha peternakan	1.400	Dinas Peternakan
				13. Program peningkatan pelestarian satwa, edukasi dan rekreasi masyarakat	5.692,79	Dinas Peternakan
				14. Program peningkatan penghidupan berkelanjutan	1.593,39	Dinas Koperasi dan UMKM
				15. Program peningkatan daya saing KUKM	3.094,4	Dinas Koperasi dan UMKM
				16. Program Peningkatan Penguatan usaha koperasi	1.512,94	Dinas Koperasi dan UMKM
				17. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1.750	BPMPP
				18. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan	2.020	BPMPP
				19. Program pengembangan wilayah transmigrasi	1.170	Dinas Sosnake rtrans

1	2	3	4	5	6	7
				20. Program Pengembangan destinasi pariwisata	1.463,58	Dinas Budpar
				21. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	2.713,4	Dinas Kehutan an

Jumlah Anggaran tahun 2016 adalah **Rp. 76,214 Milyar**

5.5. Rencana Kebutuhan Dana untuk Pencapaian sasaran dari Misi Kelima

Misi 5 : Mewujudkan peningkatan *good government* dan *democratic government*
Provinsi : Jambi
Tahun Anggaran : 2016

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, jaminan dan perlindungan hukum, serta kualitas pelayanan publik	• Nilai SAKIP • Persentase kabupaten/ kota dengan nilai SAKIP baik • Hasil audit BPK terhadap penilaian laporan keuangan daerah • Persentase kabupaten/kota mendapat nilai WTP terhadap penilaian laporan keuangan daerah • Indeks Kepuasan Masyarakat • Persentase peningkatan pengaduan masyarakat	B 54,55% WTP 45,45% A 5%	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 3. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah 4. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 5. Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	13.607 9.896,07 9.079,94 1.026,99 2.300	Inspektorat BPKAD dan Dispenda BPKAD BPKAD Biro Organisasi

1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Peningkatan pegawai tamatan S2 dan S3	8,9%	6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.018,06	BKD
		Persentase peningkatan dana CSR	7%	7. Program Koordinasi dan pembinaan pembangunan SDA 8. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	900 835	Biro Adm Perekonomian dan SDA Dinas Sosnakertrans

Jumlah Anggaran tahun 2016 adalah **Rp. 40,663 Milyar**

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Jambi tahun 2016 ini merupakan dokumen perencanaan yang strategis karena akan menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016. Laporan tersebut akan dibuat pada tahun 2017 mendatang berdasarkan hasil capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2016 berdasarkan indikator acuan seperti yang termuat dalam rencana kinerja tahunan ini. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah perlu memperhatikan indikator capaian kinerja agar peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi dapat ditingkatkan.